

Evaluasi Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Melalui Kegiatan Safari Ormas Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung

Rahma Siti Fadillah¹, Ely Sufianti², Achmad Sodik Sudrajat³, Alikha Novira⁴

Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung

Email: r.fadillah2309@gmail.com¹, ely.sufianti@poltek.stialanbandung.ac.id²,

achmad.sodik@stialanbandung.ac.id³, alika@poltek.stialanbandung.ac.id⁴

Abstract. *Community Organization (Ormas) development is an essential aspect of maintaining social stability and enhancing public participation in development. The Bandung City Government, through the National Unity and Political Agency (Bakesbangpol), organizes the Safari Ormas program as a means of facilitation and education for local community organizations. This study aims to: (1) evaluate the empowerment and supervision program through Safari Ormas by Bakesbangpol Bandung; (2) identify the challenges in implementing the Safari Ormas activities in Bandung; and (3) formulate recommendations to improve the effectiveness of Safari Ormas in supporting empowerment and supervision efforts. This research employed a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The informants consisted of Bakesbangpol Bandung officials directly involved in Safari Ormas and representatives of several participating organizations. The study applied the CIPP evaluation model developed by Daniel L. Stufflebeam to assess program success. The findings indicate that the implementation of Safari Ormas still faces several challenges, including the low level of organizational understanding among communities, limited budget and human resources (only 2–3 personnel), inconsistent scheduling, and the lack of continuous follow-up after the activity. The recommendations include developing digital training media such as posters, strengthening inter-agency collaboration and utilizing webinars or e-learning, preparing a more structured annual schedule disseminated to Ormas, and reinforcing periodic monitoring and evaluation to ensure the sustainability of program outcomes.*

Keywords: Program Evaluation, Community Organizations, Development, Safari Ormas, CIPP.

Abstrak. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan kegiatan Safari Ormas sebagai sarana fasilitasi dan edukasi bagi Ormas di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi program pemberdayaan dan pengawasan melalui Safari Ormas oleh Bakesbangpol Kota Bandung; (2) mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Safari Ormas di Kota Bandung; (3) menyusun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Safari Ormas dalam mendukung program pemberdayaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pegawai Bakesbangpol Kota Bandung yang terlibat langsung dalam Safari Ormas serta pengurus dari beberapa Ormas penerima kegiatan. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam untuk menilai keberhasilan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Safari Ormas masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (hanya 2-3 pelaksana), penjadwalan yang kurang konsisten, serta belum adanya tindak lanjut yang berkesinambungan pasca kegiatan. Rekomendasi yang diajukan mencakup pengembangan media pembinaan digital melalui poster, peningkatan kolaborasi lintas instansi dan memanfaatkan webinar atau *e-learning*, penyusunan jadwal tahunan yang lebih terencana dan tersosialisasi kepada Ormas, serta penguatan monitoring dan evaluasi berkala untuk menjamin keberlanjutan dampak pembinaan.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan, Safari Ormas, CIPP.

Received Oct 12, 2025; Revised Oct 28, 2025; Accepted Nov 15, 2025

*Rahma Siti Fadillah, e-mail address: r.fadillah2309@gmail.com

PENDAHULUAN

Kota Bandung merupakan salah satu wilayah penting di Jawa Barat yang memegang peran sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Posisinya yang strategis mendorong tingginya pertumbuhan penduduk serta menjadikan kota ini sebagai tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Keragaman tersebut memunculkan berbagai kepentingan, mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Kondisi ini tentunya memengaruhi arah kebijakan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat, memperkuat partisipasi publik serta menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hadir sebagai salah satu bentuk partisipasi publik yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ormas didefinisikan sebagai organisasi sukarela yang didirikan oleh masyarakat dengan didasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, serta kepentingan tertentu yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehadirannya tidak hanya mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat, tetapi juga menjadi kontrol sosial yang dapat memberikan masukan bahkan kritik terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penguatan regulasi Ormas dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Perubahan ini sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur perihal Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Perubahan regulasi ditujukan untuk memperkuat fungsi pemerintah terhadap Ormas, mencegah penyalahgunaan aktivitas Ormas yang bertentangan dengan Pancasila, sekaligus memberikan kejelasan hukum dalam proses pendirian, pembinaan, pemberian sanksi, dan pembubaran Ormas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Bandung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) ditetapkan sebagai salah satu penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Instansi ini bertugas menangani bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk dalam hal pembinaan, pengawasan dan pendataan Ormas di Kota Bandung. Dalam struktur Bakesbangpol Kota Bandung, tugas ini dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan.

**Tabel 1. Jumlah Ormas yang Terverifikasi di Bakesbangpol
Kota Bandung Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Ormas Terverifikasi
1.	2020	25
2.	2021	35
3.	2022	24
4.	2023	31
5.	2024	26

Sumber: *Bakesbangpol Kota Bandung*

Tabel 1 menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kota Bandung mencatat sebanyak 141 Ormas yang telah terdaftar secara resmi dan bergerak dalam berbagai bidang. Jumlah Ormas yang terverifikasi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 35 Ormas. Sebagian besar Ormas aktif di bidang sosial dan melaksanakan kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Seiring bertambahnya jumlah Ormas di Kota Bandung, pembinaan menjadi semakin penting untuk memastikan aktivitasnya tetap sesuai ketentuan hukum dan berdampak nyata bagi masyarakat. Hingga saat ini, Safari Ormas menjadi satu-satunya bentuk pembinaan langsung yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Bandung. Safari Ormas dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke sekretariat masing-masing Ormas di Kota Bandung. Kegiatan ini mulai berjalan sejak 2021 dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bersama Analis Organisasi Masyarakat sebagai bagian dari tugas pokok Bakesbangpol.

Dalam satu tahun anggaran, Safari Ormas dilakukan sebanyak 25 kali, di mana setiap kunjungan hanya menyoar satu Ormas agar diskusi dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih fokus dan mendalam. Materi yang disampaikan meliputi tugas dan fungsi Bakesbangpol, penjelasan regulasi, mekanisme pengajuan dana hibah, serta prosedur peminjaman fasilitas pemerintah untuk keperluan kegiatan organisasi. Penjadwalan Safari Ormas lebih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan waktu dan kesiapan internal Ormas sebagai pihak penerima manfaat.

Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Bakesbangpol Kota Bandung, diketahui bahwa hasil pembinaan terhadap Ormas masih belum optimal. Data hasil *post-test* pada kegiatan Safari Ormas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip berorganisasi masih berada dibawah 50% dari total Ormas yang telah mengikuti kegiatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa Safari Ormas belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab di kalangan Ormas.

Meskipun pembinaan telah dilaksanakan secara rutin, tingkat efektivitasnya pun masih belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan administratif dan rendahnya tingkat kepatuhan Ormas terhadap kewajiban kelembagaan, beberapa persoalan yang teridentifikasi antara lain:

- 1) Dari total Ormas yang terdaftar, hanya sekitar 50% yang tercatat aktif menjalankan kegiatan;
- 2) Sebagian besar Ormas belum menyampaikan laporan tahunan secara berkala;
- 3) Pergantian kepengurusan kerap tidak dilaporkan, yang mengakibatkan ketidaksesuaian dan ketidakakuratan data kelembagaan;
- 4) Masih banyak Ormas yang belum memahami bahwa kebebasan berserikat dibatasi oleh regulasi yang mengatur mekanisme kelembagaan;
- 5) Mayoritas Ormas cenderung bersikap reaktif terhadap agenda pemerintah dan belum menunjukkan peran proaktif dalam pemberdayaan masyarakat.

Kondisi tersebut diperkuat oleh beberapa insiden bentrokan antar Ormas yang terjadi pada 2021 hingga 2025. Meski frekuensinya tidak tinggi, kejadian tersebut menjadi indikasi bahwa sebagian Ormas belum sepenuhnya memahami batasan dalam berorganisasi.

Tabel 2. Bentrokan Ormas di Kota Bandung Tahun 2021-2025

Tanggal Kejadian	Ormas yang Terlibat	Pemicu/ Penyebab	Akibat	Sumber
29 Juli 2021	Manggala vs GBR	Adu mulut	2 luka tusukan	Tribun Jabar, 2021
18 April 2024	Manggala vs Sundawani	Kecelakaan ringan	1 korban jiwa	Detik Jabar, 2024
16 Januari 2025	Pemuda Pancasila vs GRIB	Provokasi kebisingan kendaraan	Penganiayaan, perusakan fasilitas umum	Kompas, 2025

Tabel 2 menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 59 Ayat 3C UU No. 16 tahun 2017 yang melarang Ormas melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, serta merusak fasilitas publik. Fakta ini mengindikasikan pemahaman tentang Batasan normatif dalam berkegiatan masih lemah di sebagian kelompok Ormas.

Fenomena tersebut menjadi indikator bahwa partisipasi masyarakat melalui Ormas memang tinggi, namun tidak semua aktivitas berdampak positif bagi stabilitas daerah. Sebagian besar Ormas juga masih bergantung pada pemerintah daerah, belum sepenuhnya mandiri dan belum mampu menjalankan aturan secara bertanggung jawab.

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kegiatan Safari Ormas. Kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas kegiatan Safari Ormas dalam mendukung program pemberdayaan dan pengawasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipilih karena lebih menekankan pada analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap narasumber yang dinilai mampu memberikan informasi relevan dan objektif, yaitu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Bakesbangpol; Analis Ormas Bakesbangpol; Tenaga Administrasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Bakesbangpol; serta perwakilan dari Ormas yang telah menerima kunjungan Safari Ormas. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, referensi kepustakaan, dan berbagai literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Context Evaluation (Evaluasi konteks)

Evaluasi konteks merupakan tahap awal dalam analisis program yang memiliki fungsi untuk menelaah latar belakang, sasaran penerima manfaat, kebutuhan, serta permasalahan yang ada. Melalui evaluasi konteks, kegiatan Safari Ormas dapat dipastikan dirancang sesuai dengan realitas lapangan serta diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang mendesak.

Safari Ormas lahir sebagai inovasi dari pola pembinaan sebelumnya yang dilaksanakan secara massal di hotel atau gedung. Pola lama dinilai kurang efektif karena tidak komunikatif, terbukti banyak pengurus Ormas belum memahami bahkan baru mengetahui adanya regulasi, khususnya UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi

Kemasyarakatan. Oleh karena itu, Bakesbangpol merancang pendekatan baru dengan mendatangi sekretariat Ormas satu per satu. Metode ini dipilih agar dialog lebih terbuka, hubungan lebih dekat, dan materi mudah dipahami.

Secara prinsip, kegiatan ini ditujukan bagi Ormas resmi yang aktif di Kota Bandung. Namun, dalam praktiknya, penentuan sasaran belum konsisten. Pada tahun 2023 terdapat 31 Ormas terdaftar, tetapi hanya 8 Ormas yang mendapat kunjungan, sementara sisanya belum tersentuh pembinaan. Kondisi ini menimbulkan potensi penumpukan sasaran pembinaan dari tahun ke tahun. Pola pembinaan selama ini cenderung bersifat seremonial, hanya melibatkan ketua atau pengurus inti, sehingga informasi yang disampaikan tidak menjangkau seluruh anggota. Safari Ormas hadir sebagai jawaban untuk memastikan materi dapat diterima langsung oleh Ormas secara menyeluruh. Meski demikian, kebutuhan akan kesinambungan kegiatan masih kuat, karena Safari Ormas tidak cukup dipahami sebagai kegiatan insidental, melainkan harus diposisikan sebagai pola pembinaan jangka panjang yang terencana.

Permasalahan yang dihadapi dari sisi pemerintah meliputi perubahan jadwal yang kerap berubah terjadi akibat berbenturan dengan agenda lain, koordinasi penjadwalan juga dilakukan secara mendadak sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan, dan komunikasi yang kurang stabil. Sementara itu, dari pihak Ormas, pelaksanaan kegiatan pada jam kerja seringkali menyulitkan kehadiran pengurus. Di samping itu, rendahnya kesadaran administratif seperti pergantian pengurus dan laporan tahunan pun masih menjadi masalah berulang.

Rendahnyalah pemahaman Ormas terhadap regulasi, terutama UU No. 16 Tahun 2017, juga masih menjadi hambatan mendasar. Dinamika pergantian pengurus membuat pengetahuan regulasi tidak merata, bahkan banyak pengurus baru belum pernah mengikuti Safari Ormas. Karena itu, pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh ialah pemanfaatan poster edukatif sebagai pengingat visual pasca-kegiatan. Poster berisi hak dan kewajiban Ormas, larangan, serta sanksi yang dapat disimpan di sekretariat maupun disebarluaskan melalui grup WhatsApp. Dengan cara ini, materi dapat terus diakses oleh seluruh anggota, baik yang hadir maupun tidak hadir saat kunjungan, sehingga fungsi Safari Ormas sebagai sarana edukasi tetap berjalan.

Input Evaluation (Evaluasi Masukan)

Evaluasi masukan merupakan tahap kedua dalam analisis program yang berfokus pada penelaahan terhadap sumber daya, strategi, dan anggaran, dengan tujuan utama memastikan kegiatan Safari Ormas berjalan menggunakan strategi yang tepat, didukung oleh sumber daya yang memadai, serta ditopang anggaran yang efektif.

Pelaksanaan Safari Ormas ditunjang oleh personel yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tim pelaksana berasal dari Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas (Bidang 3) Bakesbangpol Kota Bandung, terdiri dari unsur ASN (Kepala Bidang dan Analis Ormas) serta Non-ASN (tenaga administrasi). Jumlah pelaksana hanya tiga orang, dinilai cukup untuk jumlah peserta yang biasanya tidak lebih dari 20 orang, namun keterbatasan SDM ini membuat penjadwalan sering terganggu ketika ada agenda mendadak. Sementara itu, dari sisi penunjang, materi pembinaan disusun tim secara mandiri dengan merujuk pada UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Media komunikasi yang digunakan berupa *roll banner*, tanpa adanya modul cetak, poster, atau infografis yang dapat dijadikan bahan bacaan lanjutan. Hal ini berpotensi menurunkan daya serap peserta dalam jangka panjang.

Dari sisi strategi, Safari Ormas menggunakan pendekatan partisipatif dengan kunjungan *door to door* ke sekretariat Ormas. Strategi ini sejalan dengan pendekatan transformatif (Nur, 2018), yang menekankan interaksi dua arah untuk membangun

kesadaran kritis dan kemandirian organisasi. Strategi ini terbukti mampu menciptakan suasana lebih dekat, interaktif, dan komunikatif. Namun, dalam praktiknya, interaksi masih cenderung *top-down*, karena tim pelaksana lebih interaktif menyampaikan informasi, sedangkan partisipasi aktif peserta masih terbatas pada sesi tanya jawab.

Berdasarkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Safari Ormas Tahun 2024, alokasi anggaran difokuskan pada konsumsi peserta. Meskipun dinilai efisien untuk kebutuhan dasar, anggaran belum mencakup transportasi peserta maupun bentuk apresiasi seperti cendera mata. Hal ini menimbulkan ekspektasi yang tidak terpenuhi, karena sebagian Ormas kerap menanyakan uang transport sebagai kompensasi. Keterbatasan anggaran membuat jangkauan kegiatan belum merata dan berpotensi memengaruhi motivasi Ormas dalam berpartisipasi.

Hambatan utama dalam pelaksanaan Safari Ormas terletak pada keterbatasan SDM dan minimnya anggaran. Jumlah pelaksana yang hanya 2–3 orang, serta anggaran hanya mencakup konsumsi ringan. Akibatnya, kegiatan belum mampu menjangkau seluruh Ormas secara proporsional. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Bakesbangpol dapat meningkatkan kerja sama lintas instansi, misalnya dengan Dinas Sosial maupun Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung agar dukungan logistik hingga bentuk apresiasi non-material dapat terpenuhi. Selain itu, pemanfaatan platform digital seperti webinar atau *e-learning* dapat digunakan, agar pembinaan tetap dapat diakses meskipun tanpa kehadiran langsung tim pelaksana. Dari sisi lain, pelibatan mahasiswa magang juga dapat menjadi solusi praktis untuk membantu pendampingan lapangan tanpa memerlukan tambahan anggaran besar.

Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses bertujuan menilai bagaimana kegiatan dilaksanakan, sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, serta bagaimana keterlibatan pihak. Komponen yang dianalisis mencakup implementasi, monitoring, dan umpan balik.

Pelaksanaan Safari Ormas secara umum sudah mengikuti SOP, dimulai dari pendataan Ormas, komunikasi untuk penjadwalan, hingga persiapan materi. Saat kunjungan, tim menyerahkan absensi, menyampaikan materi utama terkait regulasi keormasan, membuka ruang diskusi, serta menutup dengan pengisian kuesioner. Meskipun rata-rata kegiatan berlangsung 1–2 jam, diskusi sering melebar ke isu pemerintahan lain, mencerminkan antusiasme peserta.

Monitoring dilakukan langsung oleh tim selama kegiatan, mencakup keterlibatan peserta, kelancaran diskusi, serta pencatatan administratif. Namun, monitoring masih bersifat administratif semata, sehingga perkembangan Ormas pasca-kunjungan sulit dilacak secara sistematis. Umpan balik internal Bakesbangpol menunjukkan evaluasi rutin telah dilakukan, tetapi indikator keberhasilan masih terbatas pada jumlah kunjungan, belum pada peningkatan kualitas pemahaman Ormas. Dari sisi eksternal, Ormas umumnya merasa kegiatan ini memberi ruang dialog yang terbuka dan memperkuat kedekatan dengan pemerintah, meski mereka berharap pembinaan dilakukan lebih sering serta menjangkau lebih banyak Ormas.

Hambatan utama proses terletak pada jadwal yang tidak teratur. Penjadwalan mendadak dari Bakesbangpol maupun kesibukan pengurus Ormas sering menghambat kehadiran anggota. Selain itu, prioritas kunjungan belum berjalan konsisten, sehingga menimbulkan kesan ketidakmerataan. Untuk itu, diperlukan penyusunan jadwal pembinaan tahunan yang lebih terencana, berbasis pendataan digital sederhana seperti *Google Sheets*, agar distribusi kunjungan lebih transparan dan partisipasi Ormas lebih optimal.

Product Evaluation (Evaluasi Hasil)

Evaluasi hasil berfokus pada keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) dari kegiatan, dengan tujuan menilai sejauh mana kegiatan Safari Ormas berhasil mencapai tujuan yang telah dirancang. Komponen yang dianalisis meliputi dampak, efektivitas, dan keberlanjutan.

Dampak kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dasar Ormas terhadap regulasi, khususnya terkait sanksi, tata cara penggunaan atribut, serta mekanisme pengajuan hibah. Jumlah Ormas yang mengajukan hibah meningkat signifikan, dari hanya dua menjadi 25 Ormas. Namun demikian, hasil *post-test* menunjukkan bahwa tingkat pemahaman regulasi masih berada di bawah 50%, sehingga peningkatan partisipasi belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan pengetahuan yang mendalam.

Dari sisi efektivitas, Safari Ormas lebih unggul dibanding sosialisasi massal karena pendekatan *door to door* mampu menciptakan suasana interaktif dan komunikatif. Meski demikian, keterbatasan tenaga dan waktu membuat hasilnya belum optimal, apalagi kuesioner evaluasi belum mampu menggambarkan perkembangan pemahaman secara berkelanjutan.

Aspek keberlanjutan menunjukkan potensi yang cukup tinggi, mengingat respons positif dari Ormas yang merasa diperhatikan dan dihargai. Namun, tidak adanya mekanisme monitoring lanjutan dan ketidakmerataan jangkauan membuat sebagian Ormas merasa belum mendapatkan pembinaan secara konsisten. Untuk memperkuat keberlanjutan, diperlukan tindak lanjut pasca-kunjungan melalui monitoring berkala, dapat dibentuk grup komunikasi resmi seperti grup WhatsApp khusus yang diisi oleh perwakilan Ormas yang telah dikunjungi, sebagai sarana koordinasi, konsultasi, dan penyebaran informasi terbaru. Selain itu, disarankan adanya kunjungan lanjutan secara berkala, misalnya setiap 2–3 tahun, terutama untuk Ormas yang telah mengalami regenerasi kepengurusan. Kunjungan ulang ini tidak harus menysasar semua Ormas, tetapi bisa dilakukan secara selektif berdasarkan riwayat pembinaan dan kebutuhan aktual.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan terkait penelitian evaluasi program pemberdayaan dan pengawasan melalui kegiatan Safari Ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, secara umum dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (hanya 2–3 pelaksana), penjadwalan yang kurang konsisten, serta belum adanya tindak lanjut yang berkesinambungan pasca kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Safari Ormas memberi manfaat dalam mempererat hubungan pemerintah dengan Ormas, efektivitasnya masih belum tercapai sepenuhnya. Untuk itu, beberapa langkah penguatan disarankan, antara lain pengembangan media pembinaan digital seperti poster agar materi dapat lebih mudah diakses. Selain itu, kolaborasi lintas instansi perlu diperluas, disertai dengan pemanfaatan webinar maupun *e-learning* sebagai solusi untuk menutupi keterbatasan anggaran dan SDM. Penyusunan jadwal tahunan yang lebih terstruktur serta disosialisasikan sejak awal juga diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan. Terakhir, monitoring dan evaluasi berkala harus diperkuat agar keberlanjutan dan dampak nyata dari pembinaan Safari Ormas dapat terus terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Amer, N. 2017. *Perspektif Negara Hukum : Analysis Dissemination of Community Organizations In The Perspective Legal Countries*. Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Volume 15 Nomor 1, 1–15.

- Arifin, C. 2021. *Cuma Gara-gara Adu Mulut, Dua Ormas di Bandung Bentrok, Korban Alami Luka Tusuk*. <https://www.tribunnews.com/regional/2021/07/31/cuma-gara-gara-adu-mulut-dua-ormas-di-bandung-bentrok-korban-alami-luka-tusuk>.
- Djuwita, T. M., dan Hermawan, D. 2018. *Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, Volume 1 Nomor 2.
- Herdiansyah, A. dkk. 2016. *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Volume 1 Nomor 1, 50-66.
- Mandak, N. W. dkk. 2022. *Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Adat (Studi Kasus Di Badan Kesbangpolda)*. *Governance*, Volume 2 Nomor 1.
- Nur, T. 2018. *Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Program AKUNU GP ANSOR Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Pramono, G. E. 2015. *Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Kelompok Kekerasan*. *Jurnal Keamanan Nasional*. Volume 1 Nomor 2, 251-272
- Pranata, K. dkk. 2023. *Evaluasi Kegiatan Keagamaan dalam Memperkuat Nilai-Nilai Religius Siswa Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Procces, Product) Di SDN 14 Atts Bukittinggi*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, Volume 1 Nomor 1, 102-114.
- Purba, D. 2025. *GRIB dan Pemuda Pancasila Sepakat Berdamai Usai Penyerangan di Bandung*. <https://bandung.kompas.com/read/2025/01/16/135553178/grib-dan-pemuda-pancasila-sepakat-berdamai-usai-penyerangan-di-bandung>.
- Putra, W. 2024. *2 Ormas Bentrok di Bandung, 1 Orang Tewas*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7299487/2-ormas-bentrok-di-bandung-1-orang-tewas>.
- Rahmadanita, A. 2019. *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. *Jurnal Tatapamong* Volume 1 Nomor 2, 92-104.
- RMOLJabar. 2025. *Kesbangpol Bandung Gencar Bina Ormas, Dorong Kepatuhan Hukum*. <https://www.rmoljabar.id/kesbangpol-bandung-gencar-bina-ormas-dorong-kepatuhan-hukum>.
- RMOLJabar. 2025. *Lebih dari 50 Persen Ormas di Kota Bandung Masih Aktif, Kesbangpol Minta Laporan Tahunan*. <https://www.rmoljabar.id/lebih-dari-50-persen-ormas-di-kota-bandung-masih-aktif-kesbangpol-minta-laporan-tahunan>

Peraturan Walikota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 yang mengatur perihal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Bandung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.